

KONDISI JAWA TENGAH PADA ABAD VIII SAMPAI ABAD XV M

Oleh:
Siti Maziyah

ABSTRACT

Using historical method, this research attempts to find out Central Java condition in the 8th to 15th Centuries. Collecting data from ancient inscriptions, ancient books, and earlier researches, indications are found that the 8th to 10th centuries Central Java seems existing as an old kingdom territory, but in the 11th to 15th centuries, it became a subordinate territory in the old kingdom. Data also indicate that the centre of the kingdom often changed places.

Keywords: *ancient Central Java, old kingdom, subordinate territory*

A. PENDAHULUAN

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan, serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang-kadang juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai "jantung" budaya Jawa. Meskipun demikian, di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat, ada pula warga Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia dan India-Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi ini.

Menurut sejarahnya, Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah (*gewesten*)

yakni Semarang, Rembang, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan (*vorstenland*) yang berdiri sendiri dan terdiri dari dua wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, sebagaimana Yogyakarta yang terdiri dari Pakualaman dan Kasultanan Ngayogyakarta. Masing-masing *gewest* terdiri atas kabupaten-kabupaten. Waktu itu *Gewest* Rembang juga meliputi *Regentschap* Tuban dan Bojonegoro. Setelah diberlakukannya *Decentralisatie Besluit* pada tahun 1905, *gewesten* diberi otonomi dan dibentuk Dewan Daerah. Selain itu juga dibentuk *gemeente* (kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang.

Sejak tahun 1930, provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi (*Provinciale Raad*). Provinsi terdiri atas beberapa karesidenan (*residentie*), yang meliputi beberapa kabupaten (*regentschap*), dan dibagi lagi dalam beberapa kawedanan (*district*). Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 karesidenan, yaitu Pekalongan, Jepara-Rembang, Semarang, Banyumas, dan Kedu.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1946 pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran, dan dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950 melalui Undang-Undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kotamadya di Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Penetapan Undang-Undang tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 1950.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490

desa/kelurahan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 4 kota administratif, yaitu Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, dan Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. Adanya kebijakan otonomi daerah, menyebabkan 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang, dari Kota Magelang ke Mungkid; Kabupaten Tegal, dari Kota Tegal ke Slawi; serta Kabupaten Pekalongan, dari Kota Pekalongan ke Kajen.



Peta Jawa Tengah (sumber: Wikipedia)

Permasalahan yang muncul pada artikel ini adalah bagaimanakah kondisi Jawa Tengah pada abad VIII sampai abad XV M, khususnya dalam kanvas pemerintahan kerajaan-kerajaan kuno di Jawa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sejarah, khususnya sejarah kuno. Dengan

demikian, maka data utama yang digunakan di dalam penelitian ini adalah prasasti-prasasti sezaman dengan permasalahan yang dikaji. Prasasti yang sesuai dengan topik permasalahan dapat dilacak pada kumpulan prasasti karya J.L.A. Brandes yang berjudul *Oud-Javaansche Oorkonden*, yang telah diterbitkan pada *VBG (Verhandelingen van de Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen)* Volume LX,

maupun pada prasasti-prasasti yang telah diteliti oleh para ahli sebelumnya. Setelah ditemukan beberapa prasasti yang dimaksud, dilakukan penerjemahan untuk mengetahui isi dari masing-masing prasasti tersebut.

Selain prasasti, digunakan pula kitab-kitab kesusasteraan serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat menunjang data. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, dilakukan interpretasi dan selanjutnya dirangkai dalam sebuah tulisan berupa hasil penelitian yang menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber-Sumber Penting mengenai Keberadaan Jawa Tengah

Ada beberapa prasasti penting yang memuat informasi mengenai keberadaan daerah-daerah di Jawa Tengah terutama pada masa-masa yang sangat awal. Prasasti-prasasti itu menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa penting di daerah Jawa Tengah lengkap dengan penanggalannya, seperti pada prasasti Canggal (Poerbatjaraka, 1952), prasasti Mantyasih (de Caparis, 1950:124-6) dan prasasti Wanua Tengah III (Kusen, 1988).

Prasasti Canggal adalah prasasti yang pertama kali ditemukan di daerah Jawa Tengah, tepatnya di halaman percdandian di atas Gunung Wukir, desa Canggal, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Prasasti itu masih menggunakan bahasa Sansekerta dan hurufnya pun masih berbentuk huruf Pallawa, sebagaimana prasasti-prasasti yang dikeluarkan sezaman seperti pada prasasti Tuk Mas yang sebenarnya berdasarkan paleografi menunjukkan masa yang lebih tua daripada prasasti Canggal, maupun pada prasasti-prasasti dari Kerajaan Sriwijaya. Perbedaan yang sangat nyata dengan prasasti-prasasti dari Sriwijaya terletak pada penulisan angka tahun, karena pada prasasti-prasasti dari Sriwijaya itu angka tahun menggunakan angka biasa, sedangkan pada prasasti

Canggal digunakan dalam bentuk candra sengkala yang berbunyi *çrutîndriya rasair* atau dalam bahasa Jawa Kuna berbunyi *çruti-indriya-rasa* yang berarti angka tahun 654 Ç (732 M).

Secara lengkap penanggalan pada prasasti Canggal berbunyi sebagai berikut: "*Çâkendre'tigate çrutîndriya-rasair ankîkêrte vatsare. Vârendrau dhavala-trayodaçi-tithau bhadrottare kartika. Lagne kumbhamaye...*" Artinya: "Pada tahun Çaka yang telah lalu dengan ditandai angka "*çrutîndriya-rasa*" yang berarti angka tahun 654 Ç (732 M), hari Senin, hari baik, tanggal 13 paro terang, bulan Kartika, dalam naungan zodiak Kumbha (Aquarius)".

Menurut penanggalan Masehi, tanggal 13 paro terang, bulan Kartika tahun 654 Ç adalah sama dengan tanggal 28 Oktober 732 M. Pada waktu itu Sanjaya yang sebenarnya telah naik tahta sejak tahun 717 M, mendirikan sebuah *lingga* (perwujudan Dewa Çiwa dalam bentuk tugu batu) di bukit Çtirangga untuk keselamatan rakyatnya karena sebelumnya kerajaan itu telah diserang oleh tentara Sriwijaya yang mengakibatkan kerusakan hebat. Pada kesempatan itu pula Sanjaya menyatakan bahwa ia adalah putra Sannaha, saudara perempuan raja Sanna. Dengan kata lain, Sanjaya menggunakan prasasti Canggal ini sebagai sarana legitimasi terhadap tahtanya pada Kerajaan Mataram Kuna.

Sebetulnya ada prasasti yang lebih tua menurut paleografinya, yaitu prasasti Sojomerto yang ditemukan di daerah Pekalongan. Prasasti itu berbahasa Melayu Kuna dan menyebutkan nama Dapunta Salendra beserta nama ayah dan ibunya, yaitu Santanu dan Bhadrawati, serta nama istrinya yaitu Sampula. Di dalam prasasti itu masih ada satu tokoh lagi yang disebut dengan predikat *Hiyang*, jadi mungkin merupakan tokoh yang telah diperdewakan dan dianggap sebagai leluhur Dapunta Salendra. Dari nama Dapunta Salendra ini kemudian diyakini oleh para ahli sejarah bahwa tokoh inilah cikal-bakal raja-raja

Mataram Kuna di Jawa Tengah. Meskipun demikian, prasasti Mantyasih, 907 M dan prasasti Wanua Tengah III, 908 M menyatakan bahwa sebenarnya cikal-bakal raja-raja Mataram Kuna adalah Sanjaya dengan menyebutkannya sebagai raja Mataram Kuna yang pertama. Kedua prasasti itu dikeluarkan oleh Rakai Watukura Dyah Balitung yang dapat naik tahta karena perkawinannya dengan salah seorang putri raja seperti yang diberitakan oleh prasasti Mantyasih, 907 M. Pada prasasti itu juga disebutkan raja-raja Mataram Kuna yang berkuasa di Medang yang terletak di Poh Pitu. Anehnya, raja-raja yang telah disebutkan pada prasasti itu kemudian direvisi melalui prasasti Wanua Tengah III yang diterbitkan setahun setelah prasasti Mantyasih. Kondisi ini sebenarnya juga merupakan suatu legitimasi terhadap tahta kerajaan.

Selain ketiga prasasti tersebut masih banyak lagi prasasti yang berhubungan dengan wilayah Jawa Tengah. Akan tetapi, ketiga prasasti tersebut sudah dapat mewakili wilayah Jawa Tengah dan situasi pemerintahan pada masa Kerajaan Mataram Kuna. Prasasti-prasasti yang lain akan digunakan sebagai data pendukung dalam pembahasan selanjutnya.

2. Jawa Tengah Abad VIII-X M: Daerah Kerajaan Kuna

Jawa Tengah adalah suatu kawasan di Pulau Jawa, yang berdasarkan kebudayaan

dan sejarahnya dapat dibedakan dengan daerah di Jawa Barat maupun di Jawa Timur. Sumber tertua yang menyebut pulau Jawa dengan kata *Yawa*, sekaligus menginformasikan keberadaan Jawa Tengah pada zaman kuna dalam artian sebagai sebuah daerah kerajaan adalah prasasti Canggal (Poerbatjaraka, *ibid*, hlm. 52-55). Prasasti yang ditemukan di halaman percandian di atas Gunung Wukir, desa Canggal, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ini dikeluarkan oleh Raja Sañjaya pada tanggal 6 Oktober 732 M untuk memperingati telah didirikannya bangunan suci untuk pemujaan *lingga* di daerah itu. Kerajaan itu bernama Mataram dan beribukota di Mèdang seperti yang disebutkan oleh prasasti Sanguran 928 M, "*kadatwan i Mèdang*" (Brandes, *op.cit.*).

Sañjaya adalah raja pertama yang bertahta di Mèdang, yang terletak di Poh Pitu yang sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui dengan jelas. Keterangan ini diketahui berdasarkan daftar urutan raja-raja pada prasasti Mantyasih dan prasasti Wanua Tengah III. Daftar itu bukan merupakan silsilah, karena pada prasasti Mantyasih raja-raja itu disebut sebagai *rahyang ta rumuhun ri mdang ri poh pitu* yang maksudnya adalah raja-raja terdahulu yang memerintah di Mèdang yang terletak di Poh Pitu. Urutan raja-raja Medang menurut kedua prasasti itu adalah sebagai berikut:

No.	Prasasti Mantyasih, 907 M	Pras. Wanua Tengah III, 908 M	Tahun Pemerintahan
	Nama Raja	Nama Raja	
1.	Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya*	Rahyanta ri Mdang ri Poh Pitu*	Tak disebut
2.	Rakai Panangkarana*	Rakai Panangkarana*	746-784
3.	Rakai Panunggalan	Rakai Panaraban	785-803
4.	Rakai Warak	Rakai Warak Dyah Manara	804-827
5.	Dyah Gula	828-828
6.	Rakai Garung*	Rakai Garung *	829-847
7.	Rakai Pikatan*	Rakai Pikatan Dyah Saladu*	848-855
8.	Rakai Kayuwangi*	Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala	856-885
9.	Dyah Tagwas	885-885

10.	Rakai Panumwangan Dyah Dewendra	885-887
11.	Rakai Gurunwangi Dyah Badra	887-887
12.	Rakai Watuhumalang	Rakai Wungkal Humalang Dyah Jbang	894-898
13.	Rakai Watukura Dyah Balitung Dharmmodaya Mahasambhu	Rake Watukura Dyah Cri Icwara ke cawotsawatungga Rudramurti	899-911

Keterangan: Daftar nama raja-raja tersebut tidak semuanya menunjukkan hubungan darah antara ayah dengan anak.

* : terdapat hubungan darah ayah dan anak

(Sumber: Prasasti Wanua Tengah III, 830 Çaka)

Menurut prasasti Mantyasih, 907 M dan prasasti-prasasti sebelumnya, seperti prasasti Kelurak, 782 M (Bosch, 1928:1-56), prasasti Abhaygiriwihara, 792 M (Casparis, op.cit. hlm. 21-22), prasasti Kayumwungan, 824 M (ibid. hlm. 38-41), dan prasasti Sojomerto yang berdasarkan paleografi berasal dari pertengahan abad VII (Poesponegoro, 1993:90-91), raja-raja tersebut di atas ternyata merupakan anggota wangsa Çailendra, wangsa yang berkuasa di Jawa Tengah semenjak abad VIII M sampai abad X M. Keterangan ini antara lain disebutkan oleh prasasti Mantyasih yang menyatakan bahwa Rakai Panangkarana telah menamakan dirinya sebagai "Permata Wangsa Çailendra". Rakai Panangkarana adalah putra Sañjaya yang kemudian meninggalkan ajaran agama Siwa dan kemudian menjadi penganut agama Budha Mahayana. Pindahan agama ini dilatarbelakangi oleh adanya penyakit yang diderita oleh Sañjaya hingga meninggalnya dalam penderitaan yang amat sangat. Penyakit itu datangnya diakibatkan karena Sañjaya ingin mematuhi ajaran gurunya yang beragama Siwa. Karena takut, kemudian Rakai Panangkarana berpindah agama dan memindahkan pusat kerajaannya ke arah timur dari daerah Kedu.

Berdasarkan gelar kerakaian yang dimiliki oleh Balitung sebagai raja yang mengeluarkan prasasti Mantyasih, yaitu Rakai Watukura, menunjukkan bahwa ia

mempunyai daerah *lungguh* di daerah Kedu Selatan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pusat kerajaan yang dimaksud tersebut di atas berada di daerah Kedu. Poerbatjaraka menunjukkan bahwa Desa Watukara masih ada hingga sekarang, yaitu di Kecamatan Bubutan, Kabupaten Purworejo, di sebelah barat Sungai Bogowonto, dekat pantai selatan (lihat Poerbatjaraka, 1932:514-520). Melihat kenyataan ini, maka mungkin sekali Rakai Panangkarana telah memindahkan pusat kerajaannya ke daerah sekitar Prambanan, atau di Kalasan, atau di daerah Purwodadi-Grobogan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan informasi dari prasasti Kelurak, 782 M yang menyatakan bahwa ia telah membangun serangkaian candi kerajaan di daerah Prambanan, antara lain Candi Sewu untuk pemujaan Mañjusri, Candi Plaosan Lor yang melambangkan kesatuan kerajaan, dan di daerah Kedu, Candi Borobudur untuk pemujaan terhadap pendiri wangsa Çailendra. Ia juga membangun Candi Kalasan pada tahun 778 M, membangun sebuah bangunan di bukit Ratu Baka pada tahun 778 M, serta sebuah biara di bukit Ratu Baka pada tahun 792 M. Selain itu, di daerah Prambanan, di Bogem dan di desa Boyolali masih terdapat sisa-sisa bangunan candi Budha yang besar, seperti arca-arca Budha dan Bodhisatwa, yang pantas diletakkan di halaman candi. Adapun di daerah Purwodadi-Grobogan ditemukan

toponim nama-nama kuno seperti Mêdang, Gunung Tugêl, dan sebagainya. Di Gunung Tugêl sampai sekarang masih terdapat sekelompok masyarakat yang beragama Hindu dan aktif menjalankan agamanya itu karena ditunjang oleh adanya semacam kuil untuk menjalankan aktivitas agamanya itu.

Prasasti Kayumwungan, 824 M ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Sansekerta dan bahasa Jawa-Kuna. Bagian yang berbahasa Sansekerta berisi keterangan mengenai raja Samaratungga, anak Rakai Panangaran, yang disebut sebagai permata wangsa Çailendra, dan anak perempuannya yang bernama Pramodawarddhani. Putri ini telah mendirikan sebuah bangunan suci agama Budha dengan nama *Çrimad Wenuwana* dan mentahbiskan arca Çri Ghananatha di dalamnya. Sedangkan bagian yang berbahasa Jawa Kuna menyebutkan bahwa pada waktu yang sama Rakayan Patapan pu Palar suami-istri memberikan tanah sawah di Waluang, di Babadan, dan di Kisir yang termasuk wilayah Kayumwungan, serta di Santwi Karung yang termasuk wilayah Tri Haji. Seluruh sawah yang memerlukan benih sebanyak 16,5 *amet* padi itu dijadikan *simabagi* bangunan suci yang didirikan oleh Pramodawarddhani itu (lihat Schrieke, 1975). Berdasarkan nama-nama desa yang disebut di dalam prasasti itu, dapat diperkirakan bahwa tanah sawah yang dijadikan *sima* itu terdapat di daerah Parakan-Temanggung. Dengan demikian, seharusnya bangunan suci itu berada di daerah Parakan-Temanggung juga karena prasasti itu sendiri menyatakan bahwa candi itu dibangun di daerah itu (*iha grame*).

Casparis (op.cit, hlm. 125) mengidentifikasi Rakarayan Patapan pu Palar sebagai Rakai Garung. Menurut Casparis, dalam salah satu prasasti pernah disebutkan *wihara i garung* dan karena amat terkenalnya bihara di Garung itu, maka daerah Garung disebut juga sebagai *Patapan* (tempat pertapaan). Sampai

sekarang masih ada kota kecamatan yang bernama Garung di lereng barat Gunung Sindoro dan Sumbing (Poesponegoro, op.cit, hlm. 117).

Di daerah Temanggung, di dekat Candi Perot, ditemukan kembali dua buah prasasti di atas batu yang cukup besar, yaitu prasasti Tulang Air. Keterangan di dalamnya menyebutkan adanya penetapan suatu daerah *sima* di desa Tulang Air oleh Rakai Patapan pu Manuku pada hari Minggu Pahing, *paringkelan Tunglai*, tanggal 15 Juni 850 M. Pada waktu itu yang menjadi raja adalah Rakai Pikatan. Ia mendapatkan tahta kerajaan karena menikahi Pramodawarddhani sebagai putri mahkota. Sebagai penganut agama Çiwa, maka Rakai Pikatan memerintahkan membangun candi kerajaan berlandaskan agama Çiwa, yaitu percandian Loro Jongrang di Prambanan. Informasi ini diketahui dari prasasti Çiwagerha, 885 M. Untuk menunjukkan perhatiannya pada istrinya yang beragama Budha, ia menambahkan dua candi perwara di kompleks Candi Plaosan Lor berupa bangunan stupa pada percandian itu. Kedua stupa itu bertuliskan *asthupa Çri Maharaja Rakai Pikatan* dan *anumoda Rakai Guruwangi dyah Saladu* (Casparis, 1950). Kedua tulisan itu berbeda dengan tulisan pada candi perwara yang lain. Hal ini membuktikan bahwa kedua stupa itu merupakan bangunan tambahan.

Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan terjadi perang perebutan tahta yang berlangsung selama satu tahun. Rakai Walaing adalah seorang raja daerah yang mencoba merebut tahta itu. Pada saat itu Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, anak bungsu Rakai Pikatan, berhasil mendesak Rakai Walaing yang kemudian mendirikan benteng pertahanan di Bukit Ratu Baka. Di tempat itu Rakai Walaing sempat mendirikan berbagai bangunan *lingga* bagi Çiwa dalam berbagai aspeknya sebagai upaya magis untuk memperoleh kemenangan. Setelah kemenangan diperoleh oleh Rakai Kayuwangi, maka ia kemudian dinobatkan menjadi raja pada

tahun 856 M dan kraton Kerajaan Mataram di pindah ke Mamratipura. Ia memerintah sampai tahun 883 M.

Setelah masa pemerintahan Rakai Kayuwangi terjadi banyak intrik di kerajaan, hingga kemudian muncul tokoh yang menarik, yaitu Çri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Çri Dharmmodaya Mahasambhu. Masa pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun (899-911 M). Berdasarkan gelar kerakaiannya tokoh ini berasal dari daerah Kedu selatan. Menurut prasasti Mantyasih, 899 M, ia dapat naik tahta Kerajaan Mataram karena pernikahannya dengan putri mahkota. Perkawinan seorang raja disebutkan dalam sebuah prasasti merupakan peristiwa langka, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan itu amat penting artinya bagi raja yang bersangkutan. Tanpa adanya perkawinan itu, kemungkinan Rakai Watukura Dyah Balitung tidak akan dapat menduduki tahta kerajaan. Peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahannya adalah adanya perluasan wilayah kekuasaan ke daerah Jawa Timur seperti yang terekam pada prasasti Kubu-Kubu, 905 M. Adapun prasasti Telang, 904 M merekam peristiwa dibuatnya tempat penyeberangan di Paparahuan, di tepi Bengawan Solo. Tempat ini sekarang namanya desa Praon yang terletak di daerah Wonogiri. Rakai Watukura membuat tempat penyeberangan ini untuk melaksanakan nazar seorang raja yang telah memerintah sebelumnya, yaitu *haji dewata sang lumah ing Çataçerngga* (raja yang telah diperdewakan dan dimakamkan di Çataçerngga). Çataçerngga adalah daerah di sekitar pegunungan Dieng, seperti yang dikatakan oleh prasasti Kutu, 804 M, bahwa di dalam prasasti itu Gunung Çataçerngga disebut sesudah Gunung Dihyang.

Setelah masa pemerintahan Rakai Watukura, kondisi politik pemerintahan tidak stabil. Pada masa pemerintahan Daksa sebagai penggantinya, ditemukan prasasti berupa lempengan emas dan perak di desa Pesindon, Kabupaten Wonosobo,

yang berangka tahun 914 M. Prasasti itu menyebutkan tentang upacara yang dilakukan Daksa bersama dengan istrinya, akan tetapi tidak jelas upacara apa yang mereka jalankan itu. Setelah pemerintahan Daksa, kondisi pemerintahan semakin tidak stabil dan sebagai puncak ketidakstabilan itu ditandai dengan adanya letusan Gunung Merapi yang terhebat dalam sejarahnya kurang lebih pada perempat pertama abad X M. R.W. van Bemmelem menyatakan bahwa letusan itu demikian dahsyatnya sehingga sebagian besar puncaknya hilang dan terjadi pergeseran lapisan tanah ke arah barat daya sehingga terjadi lipatan yang antara lain membentuk Gunung Menoreh. Letusan itu disertai dengan gempa yang hebat, banjir lahar, hujan abu, dan batu-batuan yang sangat mengerikan (Bemmelem, 1949:560-562). Kondisi itu menyebabkan rusaknya ibukota Medang dan daerah pemukiman di Jawa Tengah, sehingga oleh rakyat dirasakannya sebagai pralaya atau kehancuran dunia. Salah satu bukti dari kondisi yang digambarkan oleh R.W. van Bemmelem itu adalah tertimbunnya kompleks Candi Sambisari di daerah Kalasan sedalam 7 meter di bawah tanah. Selain itu beberapa penggalian arkeologis menunjukkan bahwa wilayah di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan sampai di daerah Bantul menunjukkan bahwa lapisan tanah pada bagian atas itu mengandung pasir yang cukup dalam. Hal ini tentu saja diakibatkan oleh adanya bencana alam yang hebat itu.

Adanya kondisi yang demikian ini mengakibatkan Raja Sindok kemudian memindahkan letak ibukota kerajaan itu ke tempat yang lebih aman dan lebih suci, yaitu ke wilayah Jawa Timur, di Tamwlang. Informasi ini diperoleh melalui prasasti Turyyan 929 M. Dengan demikian, pada waktu itu kemudian daerah di Jawa Tengah tidak lagi menjadi daerah pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Kuna, karena daerah itu sudah dianggap tidak mempunyai kesakralan yang dapat

mendukung keberlangsungan pemerintahan itu sendiri. Sesuai dengan landasan kosmogonis, maka harus didirikan kerajaan baru dengan wangsa baru pula. Oleh karena itu Pu Sindok membangun kembali Kerajaan Mataram di Jawa Timur dengan tetap mempertahankan nama Mataram.

3. Jawa Tengah pada Abad XI-XV M

Setelah Kerajaan Mataram Kuno dipindahkan ke Jawa Timur pada sekitar perempat pertama abad X M sampai awal abad XII M, maupun kemudian pada masa Kerajaan Jenggala, Kerajaan Kediri serta Kerajaan Singhasari, daerah Jawa Tengah tidak disebut-sebut lagi di dalam prasasti. Hal ini terjadi karena Kerajaan Mataram tersebut sedang meluaskan daerah pemerintahannya di wilayah Jawa Timur. Adapun daerah di Jawa Tengah pada periode itu tinggal menjadi daerah bawahan saja yang tidak banyak berperan penting pada proses pemerintahan, sehingga tidak banyak yang menyebutkan daerah itu kecuali pada naskah Nagarakertagama yang digubah pada masa Kerajaan Majapahit. Daerah-daerah Jawa Tengah yang disebut oleh naskah Nagarakertagama adalah Watukura (pupuh 77:3), Mèdang (pupuh 78:5), Pikatan (pupuh 17:4; 73:3), Waleri (pupuh 41:4), Sêcang (pupuh 23:1), Têlang (pupuh 76:4), Lasêm (pupuh 5:1; 6:1; 12:2, 18:3; 59:3; 84:5), Mataram (pupuh 6:3), Matahun (pupuh 6:1; 12:2; 58:3; 65:3), dan Pajang (pupuh 5:2; 6:2; 18:3; 59:3; 84:4).

Menjelang keruntuhan Kerajaan Majapahit yang diakibatkan oleh datangnya pengaruh Islam, banyak masyarakat yang beragama Hindu merasa terdesak oleh ajaran baru itu dan berusaha untuk tetap mempertahankan agamanya dengan jalan mendirikan bangunan-bangunan suci di daerah-daerah perbukitan tempat mereka melarikan diri mencari keamanan dalam menjalankan agama mereka di daerah Karanganyar, Surakarta. Bentuk arsitektur bangunan-bangunan itu

ternyata justru mendekati bentuk-bentuk arsitektur bangunan masa prasejarah, yaitu dalam bentuk bangunan yang berteras atau berundak-undak, dengan teras teratas sebagai tempat tersakral. Pada bagian itu dibuat sebuah candi induk dalam bentuk bangunan piramida terpancung, dan pada bagian puncaknya terdapat sebuah altar sebagai tempat pemujaan. Akan tetapi, berdasarkan struktur bangunannya, kompleks per candian ini ternyata menunjukkan seperti kompleks-kompleks per candian di Jawa Timur, yaitu “berjalan ke belakang”, dalam artian, tempat yang paling suci berada di tempat paling belakang. Lokasi bangunan itu tepatnya berada di Bukit Suku, oleh karena itu, kompleks per candian itu kemudian dinamai Candi Suku. Di dekat Bukit Suku juga ditemui bangunan per candian yang arsitekturnya hampir sama, berundak-undak, dinamai Candi Cetho.

Pada Candi Suku itu ditemui tiga *candra sangkala memet*, yaitu *candra sangkala* dalam bentuk gambar, yang semuanya menyebutkan angka tahun yang sama yaitu tahun 1359 Ç (1437 M). Ketiga *candra sangkala memet* itu dapat dibaca sebagai berikut: “*wiwara wiyasa anahut jalu*”. Sedangkan pada patung yang terletak di depan candi induk, yang menggambarkan cerita Garudeya, ditemui prasasti yang menuliskan angka tahun 1363 Ç (1441 M). Dengan demikian dapat diketahui bahwa proses pembuatan Candi Suku itu terjadi menjelang pertama abad XV M, pada saat menjelang keruntuhan Kerajaan Majapahit.

4. Ibukota Kerajaan yang Berpindah-pindah

Pada tulisan bagian 3.2. di atas, berdasarkan berita dari prasasti, dapat diketahui bahwa Kerajaan Mataram setidaknya mengalami empat kali pemindahan pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan pertama berada di Mèdang yang terletak di Poh Pitu, daerah yang berada di sekitar Kedu. Ibukota kerajaan

itu kemudian dipindahkan lebih ke timur oleh Rakai Panangaran. Letaknya tidak diketahui secara jelas, karena di prasasti pun tidak disebutkan letak Mêdang pada masa pemerintahan Rakai Pangkaran itu. Hanya berdasarkan tinggalan-tinggalan arkeologisnya dapat diperkirakan berada di daerah sekitar Prambanan. Kemudian ibukota kerajaan itu dipindah lagi oleh Rakai Kayuwangi, karena daerah di sekitar Prambanan sudah dianggap tidak sakral lagi, karena di daerah itu telah terjadi perang perebutan tahta antara Rakai Pikatan dengan Rakai Walaing, seorang raja daerah. Oleh karena itu, ketika Rakai Kayuwangi naik tahta menggantikan Rakai Pikatan, letak Mêdang, ibukota kerajaan itu, dipindah ke Mamratipura. Pemindahan yang ketiga terjadi pada masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung, yang berdasarkan kerakaiannya pusat pemerintahan itu kembali ke daerah Kedu. Selanjutnya pemindahan yang terakhir dilakukan oleh Pu Sindok ke daerah Tamwlang, di Jawa Timur, karena terjadi pralaya yang diakibatkan oleh meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah.

Sebenarnya perpindahan ibukota suatu kerajaan merupakan hal yang biasa pada masa Kerajaan Mataram Kuna. Hal itu sebenarnya dilandasi oleh kepercayaan agama Hindu pada masyarakat Jawa Kuna, yaitu dikenalnya konsep satu hari Brahma sebagai konsep waktu berlangsungnya dunia. Di dalam konsep itu terdapat *kaliyuga*, suatu konsep yang membenarkan terjadinya perpindahan pusat pemerintahan, agar tercapai kemakmuran kembali bagi raja dan seluruh rakyat yang dipimpinnya. Pada konsep satu hari Brahma itu, masyarakat Jawa Kuna mengenal pembagian zaman menjadi empat babak, yaitu *Kertayuga* (zaman emas), *Tertayuga* (zaman perak), *Dwaparayuga* (zaman perunggu), dan *Kaliyuga* (kiamat). Sebelum mencapai zaman Kaliyuga ini, terjadi *pralaya*, yaitu proses paling rumit dalam pembabakan zaman karena harus melalui proses hancur-

hancuran. *Pralaya* adalah zaman yang dikuasai oleh Dewi Kali, sehingga mengakibatkan orang-orang selalu berbuat negatif (Poesponegoro, op.cit, hlm. 88-190). Dewi Kali adalah perwujudan istri Çiwa dalam kondisi marah. Satu-satunya tokoh yang dapat meredam amarah Dewi Kali adalah Wisnu.

Konsep *pralaya* itu bermacam-macam, misalnya di dalam prasasti Çiwagerha, 856 M dikatakan bahwa *pralaya* yang terjadi di kerajaan Rakai Pikatan diakibatkan oleh serangan dari Rakai Walaing yang mengakibatkan kerajaan Rakai Pikatan menjadi porak-poranda. Pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Rakai Panangaran, konsep *pralaya* itu terjadi dengan meninggalnya Sanjaya yang menderita sakit akibat dari keinginan Sanjaya untuk mematuhi ajaran gurunya. Oleh karena itu, kemudian Rakai Panangaran tidak saja memindahkan ibukota kerajaan, tetapi kemudian juga mengganti agama yang dianutnya, yaitu dari agama Hindu kemudian beralih pada agama Budha. Selanjutnya pada masa Pu Sindok *pralaya* itu ditunjukkan oleh adanya “amarah dari para dewa” dengan meletusnya Gunung Merapi. Menurut agama Hindu, satu-satunya yang hidup pada masa *pralaya* itu adalah Wisnu. Dengan demikian dapat dimengerti jika kemudian Airlangga yang berhasil mengukuhkan kembali kerajaan Dharmawangsa Teguh seperti yang diberitakan pada prasasti Pucangan menyatakan bahwa dirinya merupakan titisan dari dewa Wisnu. Konsep adanya *pralaya* ini dapat diterapkan pada pemerintahan dan individu. Ukuran *pralaya* dapat juga terjadi pada diri raja sebagai wakil dari dewa. Misalnya ada seorang raja yang dapat dibunuh oleh seorang petani. Menurut kepercayaan Jawa Kuna, hal ini merupakan suatu *pralaya*, karena raja dapat meninggal “hanya” oleh seorang petani saja.

Selain mengenal konsep satu hari Brahma, masyarakat Jawa Kuna juga memiliki kepercayaan terhadap adanya

ketidakstabilan pemerintahan yang mengakibatkan harus pindahnya pusat pemerintahan itu ke tempat lain yang lebih suci dan penuh dengan perlindungan dari dewata. Sebab-sebab berpindahnya pusat pemerintahan itu dapat terjadi karena raja yang memerintah sudah lebih dari 3 generasi atau 5, 7, 9, dan seterusnya yang merupakan urutan ganjil; jika keraton itu sudah pernah diduduki atau pernah dikalahkan oleh musuh; serta jika terjadi bencana alam yang dipercaya sebagai kutukan dari dewa. Meskipun sebab pertama sampai ketiga itu merupakan faktor perpindahan kerajaan, akan tetapi faktor yang paling mempengaruhi adalah agama (Schrieke, 1957; Geldem, 1942).

Seperti yang telah disebutkan pada tulisan bagian 3.2., bahwa letak ibukota-ibukota kerajaan itu tidak dapat dikenali lagi sekarang. Hal ini antara lain disebabkan bentuk fisik bangunan kraton itu sudah tidak dijumpai lagi. Istana yang baru itu biasanya dibangun di sekitar tanah yang subur. Sering terjadinya perpindahan ibukota kerajaan mempengaruhi semua sumber daya kekuasaan yang sudah terbatas, tersedot dipergunakan untuk proses migrasi dan membangun ibukota yang baru. Menurut babad memindahkan ibukota kerajaan hampir selalu dimulai dengan merabas hutan yang lebat, kemudian didirikan istana yang sederhana dengan menggunakan bahan yang ada di sekitarnya. Istana disempurnakan secara bertahap sambil membuka hutan untuk tanah pertanian, dan saluran pengairan dengan mengerahkan semua rakyat. Hutan yang lebat, binatang buas, dan perhubungan yang sulit menyebabkan pembangunan ibukota kerajaan memerlukan waktu yang cukup lama (Sudjana, 2001:4,13). Dengan demikian tidak mengherankan jika sampai sekarang tidak pernah dijumpai istana-istana pada zaman kuna, karena bahan bangunan istana-istana itu terbuat dari kayu yang tidak dapat tahan lama. Hal ini dikuatkan oleh berita Cina dari Dinasti Tang yang berkuasa pada tahun 618-907 yang

menyebutkan sebagai berikut (Groeneveldt, 2009:18-19): “Ka-ling juga dikenal dengan nama Java, terletak di samudra selatan, di sebelah timur Sumatra dan di sebelah barat Bali. Di sebelah selatannya terdapat lautan dan di sebelah utaranya terdapat Kamboja. Penduduknya membuat pertahanan dari kayu. Bahkan bangunan terbesar juga ditutupi oleh daun palem. Mereka memiliki balai-balai dari gading dan tikar yang terbuat dari kulit terluar dari bambu. Tembok kota terbuat dari balok-balok kayu. Di dalamnya terdapat sebuah bangunan besar berlantai dua yang ditutupi dengan kulit palem *gomuti*. Di gedung inilah raja tinggal. Dia bertakhta di balai-balai gading.”

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa daerah Jawa Tengah sebenarnya sudah menjadi daerah pusat pemerintahan semenjak awal abad ke VIII M hingga abad X M. Adapun pada abad XI-XV M, daerah Jawa Tengah bukan merupakan daerah yang penting, sehingga jarang disebut oleh sumber sejarah kuna.

Ibukota kerajaan itu berdasarkan bukti-bukti dari prasasti sering mengalami perpindahan karena adanya alasan-alasan yang menyebabkan daerah itu tidak suci lagi, dan ibukota kerajaan itu “bergerak” dari daerah Kedu menuju ke arah timur kemungkinan ke daerah Kalasan, daerah Prambanan, atau daerah Purwodadi-Grobogan. Sampai saat ini keraton Kerajaan Mataram Kuna itu tidak dapat dijumpai lagi karena bahan bangunan yang digunakan berasal dari kayu dan bahan-bahan yang cepat rusak. Berdasarkan berita-berita dari prasasti dapat diketahui bahwa daerah di sekitar pegunungan Sindoro-Sumbing dan daerah di sekitar Parakan Temanggung merupakan daerah penting pada masa itu. Kemungkinan daerah ini merupakan daerah sakral, karena adanya pegunungan Dihyang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelem, R.W. van. 1949. *The Geology of Indonesia*.
- Boechari. 1976. "Some Considerations on the Problem of the Shift of Mataram's Center", *Bulletin of the Research Center of Archaeology of Indonesia*, no. 10.
- Bosch, F.D.K. 1928. "De inscriptie van Keloerak", *TBG*, LXVIII.
- Brandes, J.L.A. "Oud-Javaansche Oorkonden", XXXI, Nagelaten transcripties van wijlen Dr. J.L.A. Brandes, uitgegeven door Dr. N.J. Krom, *VBG*, LX.
- Casparis, J.G. de. 1950. "Short Inspiration from Candi Plaosan Lor", *Berita Dinas Purbakala*, No. 4.
- Casparis, J.G. de. 1950. *Inscripties uit de Çailendra-tijd (Prasasti Indonesia I)*. Bandung: Masa Baru.
- Geldem, R. Von Heine. 1942. "Conceptions of States and Kingship in South East Asia", *FEO*, 22.
- Groeneveldt, W.P. 2009. *Nusantara dalam Catatan Tionghoa*, terjemahan Gatot Triwira, cetakan pertama. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kusen. 1988. "Prasasti Wanua Tengah III, 830 Çaka: Studi Tentang Latar Belakang Perubahan Status Sawah di Wanua Tengah Sejak Rake Panangkaran sampai Rake Watukura Dyah Balitung", *Makalah Kegiatan Ilmiah Arkeologi*. Yogyakarta: IAAI Komisariat Yogyakarta-Jawa Tengah.
- Poerbatjaraka. 1932. "Enkele oude plaatsnamen besproken", *TBG*, LXXII.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, eds. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia*, II, Edisi IV, Cet. VIII. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerbatjaraka, R. Ng. 1952. *Riwayat Indonesia*. Djakarta: Pembangunan.
- Schrieke, B.J.O. 1957. *Indonesian Sociological Studies*, Part two: *Ruler and Realm in Early Java*. The Hague/Bandung: W. Van Hoeve.
- Schrieke, B.J.O. 1975. *Sedikit Uraian tentang Pranata Perdikan*. Jakarta: Bhratara.
- Sudjana, I Made. 2001. *Nagari Tawon Madu*, Cet. I. Bali: Larasan-Sejarah.
- Stuterheim, W.F. 1927. "Een belangrijk oorkonde uit de Kedu", *TBG*, LXVII.

